

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terjadi perubahan sebutan atau istilah, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)). Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu kegiatan pemerintahan telah berjalan dengan baik, maka dari itu pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Wati *et al.*, 2014). Sehingga dari publikasi laporan keuangan tersebut dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan media yang di gunakan oleh entitas terkhusus pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangan kepada pihak yang berkepentingan (publik). Dari perspektif rakyat di daerah, laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan SAP dapat menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola keuangan dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah merevisi standar akuntansi pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu PP 71 tahun 2010 menggantikan PP No.24 tahun 2005. Dalam perubahan tersebut, standar akuntansi pemerintahan yang dulu berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) akan berubah menjadi berbasis akrual (*Accrual Basic*). Diharapkan dari perubahan penerapan SAP berbasis akrual tersebut dapat memperbaiki permasalahan umum yang terjadi di instansi pemerintahan mengenai kualitas laporan keuangan yang buruk. Dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi karakteristik ; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami ( PP No.71 tahun 2010).

Informasi laporan keuangan dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 tahun 2010). Ketika informasi yang disajikan didalam laporan keuangan telah sesuai dengan karakteristik kualitatif yang disyaratkan maka kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan akan mudah dipahami dan bebas dari kesalahan-kesalahan yang menyimpang, sehingga para pengguna laporan keuangan akan lebih mudah untuk mengambil keputusan dengan baik. Namun sebaliknya, apabila informasi yang terkandung didalam laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan maka akan banyak menimbulkan permasalahan.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran sejak diaudit oleh BPK-RI dari berdiri pada tahun 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 belum pernah memperoleh opini yang tertinggi yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian namun hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada tahun 2016 hingga 2018 barulah Pemerintah Kabupaten Pesawaran mendapat predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ketiga kali secara beruntun dari 2017, 2018 dan 2019. Akan tetapi walaupun mendapat predikat WTP, BPK-RI juga mendapatkan beberapa temuan atau kasus. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I, BPK menemukan pemeriksaan tentang Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran

2017 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Sedangkan di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II, BPK juga menemukan Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Instansi Terkait Lainnya di Gedung Tataan. (IHPS I – II, 2-18).

BPK RI Kabupaten Pesawaran menemukan permasalahan yakni masih rendahnya kualitas informasi laporan keuangan daerah yang disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan itu sendiri yang berhubungan langsung dengan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi, belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan dan masih lemahnya sistem pengendalian internal serta penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang kurang diperhatikan oleh Pemerintahan Kabupaten Pesawaran.

Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dibidang pengelola keuangan. SDM harus memiliki kompetensi dibidang akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan agar laporan keuangan tersebut memiliki kualitas yang baik. Namun sudah jadi permasalahan umum yang terjadi di pemerintahan khususnya pemerintah daerah bahwa untuk menerapkan manajemen sumber daya manusia, seringkali yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Nurillah, 2014). Sehingga diharapkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan maka dibutuhkan bukan hanya jumlah sumber daya manusia melainkan kompetensi yang dimiliki SDM tersebut. Celviana (2010) yang menyimpulkan bahwa SDM bidang akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaannya. Dalam mewujudkan sistem perusahaan yang baik dan tepat, dibutuhkan suatu analisa dan evaluasi. Dimana hal tersebut diharapkan mampu mencegah penyelewengan yang dapat terjadi di dalam suatu perusahaan. Agar struktur pengendalian internal berfungsi dengan baik, diperlukan penerapan kelima komponen pengendalian internal sehingga akan mendorong terlaksananya struktur pengendalian internal yang memadai. Sebagaimana telah diketahui bahwa mutu struktur pengendalian ini sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendektasian penggelapan (*fraud*). Pada tingkatan organisasi tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan oprasional dan strategis, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi (Anggraeni, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Adanya sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mampu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Disisi lain dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah tersebut, pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Selain itu kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAP sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta mencegah terjadinya kerugian negara (Hasyim, 2017). Standar akuntansi pemerintahan memiliki kontribusi yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan oleh Suwita (2015)

tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Triyanti (2018) dengan judul pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (2) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Perbedaan penelitian ini adalah yang pertama penambahan variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Suwita, 2015), penambahan variabel ini karena pada dasarnya sistem akuntansi adalah satu kesatuan yang apabila diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Dan yang kedua studi kasus di lakukan pada Pemerintahan Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan uraian diatas, maka judul penelitian **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian yaitu dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi, sistem pengendalian internal dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, variabel terikat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran?
3. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk menguji secara empiris sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Untuk menguji secara empiris penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dan memahami perbandingan antara konsep

yang diberikan pada masa perkuliahan dengan penerapannya langsung di instansi pemerintahan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Akademik

Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan data empiris bagi pembangunan ilmu pengetahuan. Dan sebagai informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai standar akuntansi pemerintahan.

### b. Bagi Pemerintah Daerah

Pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam mengambil kebijaksanaan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan daerahnya di masa yang akan datang. Dimana faktor penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pegawai dalam penyusunan laporan keuangan daerah sehingga tingkat kualitas dari laporan keuangan daerah.

### c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan variabel terikat yaitu kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi, sistem pengendalian internal penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis dan perhitungan statistik, serta pembahasan.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan. Selain itu disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**